



CASCADING SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB. I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	1.1
1.2 Gambaran Umum	1.2
1.4 Ruang Lingkup	1.7
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II.1
2.1 Rencana Strategis	II.1
2.2 Visi dan Misi	II.2
2.3 Tujuan, Sasaran dan IKU	II.3
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan	II.4
2.5 Cascading Kinerja	II.6
BAB. III PENUTUP	III.1
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Good governance (kepemrintahan yang baik) merupakan *masyarakat bagi* setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adapun salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju "*good governance*" adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah: (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Gambaran Umum

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 227 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang menegaskan bahwa Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau ketentuan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

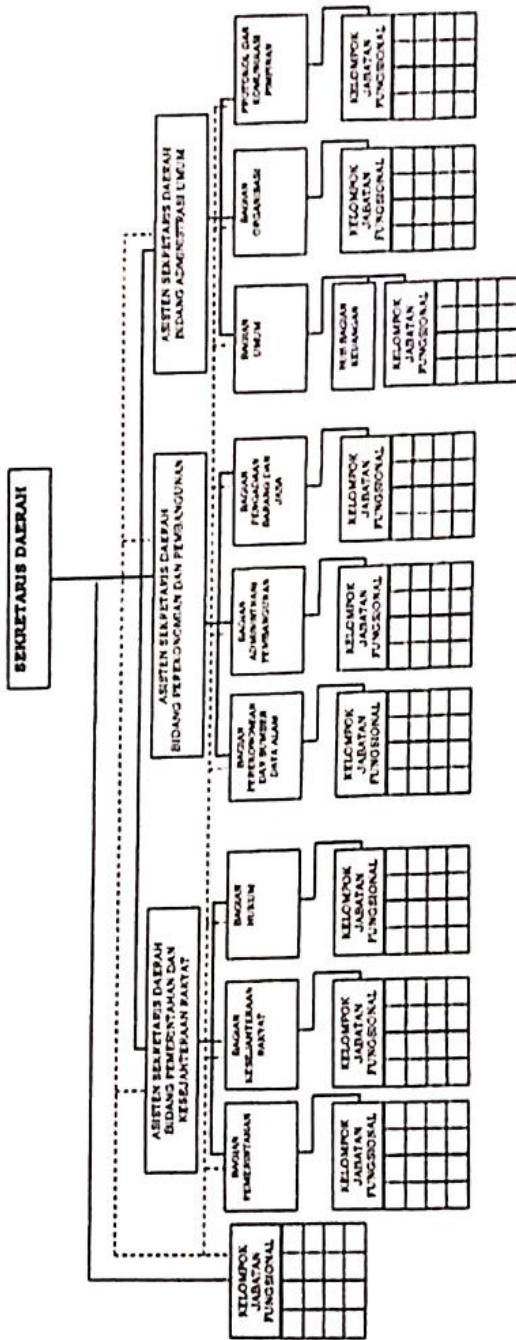
Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari:

- 1. 1 (Satu) orang Sekretaris Daerah
- 2. 3 (Tiga) orang Staf Ahli
- 3. 3 (Tiga) orang Asisten Sekretaris Daerah
- 4. 9 (Sembilan) orang Kepala Bagian
- 5. 1 (Satu) orang Kepala Subbagian Keuangan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - 1. Bagian Pemerintahan;
 - 2. Bagian Hukum; dan
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri atas:
 - 1. Bagian Organisasi;
 - 2. Bagian Umum, terdiri atas:
 - a) Subbagian Keuangan;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- e. Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan Laporan Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah :

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perencanaan yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 terdiri dari :

- BAB I Pendahuluan, memuat Latar Belakang, Gambaran Umum, dan Ruang Lingkup
- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat Informasi tentang Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja (Cascading Kinerja)
- BAB III Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. Visi dan Misi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Purwakarta pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yaitu :

Visi Kabupaten Purwakarta

“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”.

Misi Kabupaten Purwakarta

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan
4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kokoh Berbasis Desa

2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah **meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah umum yang baik dan efektif.**

Selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai IKU (Indikator Kinerja Utama) untuk mengukur apakah Sasaran Strategis (SS) dapat mengkonfirmasi Tujuan Strategis (TS) yg akan dicapai.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU
Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta

Visi : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		
Misi Ke-Dua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional		
Tujuan:	Sasaran:	Indikator Kinerja
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah umum yang baik dan efektif	Persentase Perangkat Daerah yang strukturnya sesuai dengan fungsi organisasinya.
		Persentase dokumen ketatalaksanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi.
		Persentase Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi.
		Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
		Persentase produk hukum yang berkeadilan, efektif dan tepat sasaran.
		Persentase peningkatan capaian kinerja pembangunan.
		Optimalisasi pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa .
		Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi.
		Persentase penyusunan anggaran yang tepat waktu dan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.
		Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor.
		Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

2.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, yaitu :

➤ **Strategi**

Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan

➤ **Kebijakan.**

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi Pemerintah Daerah. Sekretariat Daerah selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan Umum Sekretariat Daerah yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta**

VISI :	Mewujudkan Purwakarta Istimewa		
MISI II :	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	Sasaran 1.1	Strategi 1.1.1	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan	Pengintensifan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
			Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
			Penataan Sistem Regulasi Perundang-Undangan Secara Tertib dan Efektif

			Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
			Penguatan Kebijakan dan Implementasi Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara
			Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah

2.5. Cascading Kinerja

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV. Adapun Rincian Perjanjian Kinerja atau Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran.

CASCADE KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 2022

SEKRETARIAS DAERAH

TUJUAN: Mewujudkan Tata Kerja Pemerintahan yang Baik dan Efektif

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU):

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan
3. Persentase Fasilitas Bantuan Hukum
4. Persentase Sosialisasi Produk Hukum
5. Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
6. Persentase kerjasama daerah yang sesuai dengan kebutuhan
7. Persentase fasilitasi naskah kerjasama daerah
8. Persentase Identifikasi dan inventarisasi wilayah perbatasan dan rupa bumi buatan dan rupa bumi alam yang terdokumentasi

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator

1. Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Persentase Produk Hukum yang berkeadilan, Efektif Dan Tepat Sasaran
3. Persentase Kepuasa Masyarakat Terhadap Pelanggaran Publik

Kepala Bagian Pemerintahan		Kepala Bagian Hukum		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Indikator Utama:	Indikator Utama:	Indikator Utama:	Indikator Utama:	Indikator Utama:	Indikator Utama:
Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Produk Hukum yang berkeadilan, Efektif Dan Tepat Sasaran	Persentase Produk Hukum yang berkeadilan, Efektif Dan Tepat Sasaran	Terperutnya kajian terhadap naskah akademis yang dibuat	Terperutnya kajian terhadap naskah akademis yang dibuat	Terfasilitasinya Kegiatan keagamaan dengan baik
1. Tersusunnya Dokumen LPPD dan ILPPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	1. Tersusunnya kajian terhadap naskah akademis yang dibuat	1. Terperutnya kajian terhadap naskah akademis yang dibuat	2. Tenaksananya Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2020	2. Tenaksananya Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2020	2. Meningkatnya Kualitas Kegiatan Festival Ramadhan Tl. Kabupaten Purwakarta
2. Terlaksananya PAW Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta	2. Tenaksananya Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	2. Tenaksananya Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	3. Bimtek Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah	3. Bimtek Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah	3. Meningkatnya Kualitas SDM dan Kinerja Pemuka Agama di Kabupaten Purwakarta
3. Terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja penyusunan LPPD dan RLPPD	3. Bimtek Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah	3. Bimtek Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah			4. Meningkatnya pemahaman

<p>4. Tersedianya operasional kegiatan peningkatan kinerja pada Bagian Pemerintahan dan Organisasi daerah</p> <p>5. Tersedianya penunjang kegiatan kerjasama daerah</p> <p>6. Terselenggaranya kegiatan Penyusunan SFM & Urusan Pemerintahan</p> <p>7. Terlaksananya kegiatan penguasaan batas daerah di wilayah Kabupaten Purwakarta</p> <p>8. Terlaksananya kegiatan Verifikasi Nama Rupa Bumi unsur buatan</p> <p>9. Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kecamatan Se- Kabupaten Purwakarta</p> <p>10. Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kelurahan Se- Kabupaten Purwakarta</p> <p>11. Terlaksananya kegiatan pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Se- Kabupaten Purwakarta</p>		<p>4. Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Raperda dan Raperbup Tahun 2020</p> <p>5. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Terlaksananya Penyelesaian Hukum dan Gugatan Hukum Non Litigasi di Pemerintah Kab. Purwakarta</p> <p>7. Terlaksananya Kerja Sama Pengangan Perkar a Hukum Dengan Kantor Hukum Profesional</p> <p>8. Terlaksananya Pengangan Instruksi RANHAM di Kab. Purwakarta</p> <p>9. Terlaksananya penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan di kecamatan dan desa/kelurahan</p> <p>10. Terlaksananya Penyelenggaraan Buletin Aparatur Pemerintah Desa dalam Menyusun Rancangan Produk Hukum Desa</p> <p>11. Terlaksananya penataan dokumentasi hukum dengan pemanfaatan dan pengembangan teknologi dokumentasi hukum</p> <p>12. Terlaksananya Penyelenggaraan Sosialisasi dan Konsultasi Hukum di Desa Kelurahan</p> <p>13. Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Desa Kelurahan Sadar Hukum di Kab. Purwakarta</p>		<p>5. Menyang Bahaya Narkoba di Lingkungan Purwakarta</p> <p>6. Meningkatkan Kinerja Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Purwakarta</p> <p>7. Meningkatkan Kinerja TP LKAS Kabupaten dan Kecamatan</p> <p>8. Meningkatkan Kinerja Komisi Penganggulangan AIDS Kabupaten Purwakarta</p> <p>9. Persentase Meningkatnya ANK di Lintas Sektor</p> <p>10. Kebersihan di Kabupaten Purwakarta</p> <p>11. Terlaksananya Kegiatan kemasarakatan dengan baik</p> <p>12. Terpenuhinya Money Program pada Sektor Kesi a dan Kemasarakatan</p> <p>13. Persentase Meningkatnya kemitraan dan pembaruan bentuk organisasi yang baik bagi Organisasi kepemudaan dan olah raga di Kab. Purwakarta</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perencanaan dan Pembangunan			
Indikator			
1. Persentase Penyusunan Anggaran yang tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan			
2. Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan			
3. Optimalisasi Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa			
Kepala Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
Indikator Utama:	Indikator Utama:	Indikator Utama:	Indikator Program:
Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan	Optimalisasi Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa	
<p>Indikator Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Wilayah Perusahaan Daerah, Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan yang Dimonitoring dan evaluasi di Kabupaten Purwakarta Jumlah Wilayah Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Purwakarta Jumlah Wilayah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Purwakarta yang Dipantau dan Dievaluasi Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Tugas 	<p>Indikator Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Bimbingan teknis penatausahaan keuangan OPD Setda Terlaksananya Pengadaan sarana administrasi keuangan dan pelayanan keuangan SETDA Terlaksananya Penyusunan rencana kerja anggaran SKPD Terlaksananya Penyusunan LAKIP Setda tahun 2019 Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 Terlaksananya seluruh kegiatan sistem penguatan dan pengendalian Intern Pemerintah Di 	<p>Indikator Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Peningkatan kinerja bagian layanan pengadaan barang/ jasa Terlaksananya Peningkatan kinerja admin rencana umum pengadaan Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa bantuan hukum pengadaan barang/jasa Terlaksananya Sosialisasi peningkatan kompetensi dan kapasitas keahlian PPK dalam persiapan perencanaan pengadaan barang/jasa Terlaksananya Pemeliharaan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) LPSE Purwakarta Terlaksananya kegiatan Langganan sewa Bandwidth LPSE Purwakarta Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Perawatan Rutin Berkala melalui Service Level Agreement Colocation Server UKPSJ Kabupaten Purwakarta Terlaksananya Pengadaan Sarana 	

	<p>Tim Pengendali Inflasi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Pasar Desa dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa Jumlah Agen Gas di Wilayah kabupaten Purwakarta yang Dimonitoring dan Evaluasi Jumlah Wilayah Sentra Usaha Kecil Daerah yang Dipantau dan Evaluasi di Kabupaten Purwakarta 	<p>Kabupaten Purwakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen juknis pengelolaan anggaran belanja daerah Tersedianya dokumen analisis standar belanja daerah Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Pembangunan Tahun 2020 Tersedianya Data Base Bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan Terlaksananya Penyusunan Arsitektur dan Peta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tersedianya dokumen Evaluasi dan pelaporan pembangunan prasarana wilayah Tersedianya hasil Evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang lingkungan hidup dan perhubungan Tersedianya Evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi informasi 		<p>dan Prasarana BLPB)</p> <ol style="list-style-type: none"> Telaksananya Pereliharaan gedung BLPB Purwakarta Terlaksananya Peningkatan kapasitas keahlian pengadaan barang jasa
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikator:

Aspek Substansi Daerah Bidang Administrasi dan Umum

1. Persentase Perangkat Daerah yang Strukturnya sesuai dengan fungsi Organisasinya
2. Persentase Jumlah Staf Tatakelola yang disusun sesuai dengan kebutuhan Organisasi
3. Persentase Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan Normasi Birokrasi
4. Persentase Pegawai yang memiliki kompetensi Kompetensi
5. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor
6. Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Kepala Region Organisasi	Kepala Region Umum	Kepala Region Protokol dan Komunikasi Pimpinan
<p>Indikator Utama: Persentase Tatakelola Organisasi yang sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Indikator Utama: Persentase Pegawai yang memiliki kompetensi</p>	<p>Indikator Utama: Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor</p>
<p>Persentase Perangkat Daerah yang Strukturnya sesuai dengan fungsi Organisasinya</p>	<p>Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor</p>	<p>Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor</p>
<p>Indikator Program: Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjalinya komunikasi dan kelengkapan sekretaris Daerah Seluruh Indonesia 2. Meningkatnya penyelenggaraan Perbup Tata Naskah Dinas di Kabupaten Purwakarta 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 4. Meningkatnya Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	<p>Indikator Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi 2. Tersedianya data kinerja OPD 3. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang – undangan 4. Meningkatnya pemenuhan 	<p>Indikator Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelayanan Kedisiplinan KDH / WKDH 2. Tersedianya penunjang kinerja Keprotokolan 3. Tersedianya sarana dan prasarana keprotokolan 4. Tersedianya sarana dan prasarana alat komunikasi pimpinan 5. Terlaksananya pemeliharaan

	<p>Tim Pengendali Inflasi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Jumlah Pasar Desa dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa 6. Jumlah Agen Gas di Wilayah kabupaten Purwakarta yang Dimonitoring dan Evaluasi 7. Jumlah Wilayah Sentra Usaha Kecil Daerah yang Dipantau dan Evaluasi di Kabupaten Purwakarta 		<p>Kabupaten Purwakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Jumlah Dokumen juknis pengelolaan anggaran belanja daerah 8. Tersedianya dokumen analisis standar belanja daerah 9. Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan 10. Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Pembangunan Tahun 2020 11. Tersedianya Data Base Bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan 12. Terlaksananya Penyusunan Arsitektur dan Peta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 13. Tersedianya dokumen Evaluasi dan pelaporan pembangunan prasarana wilayah 14. Tersedianya hasil Evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang lingkungan hidup dan perhubungan 15. Tersedianya Evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi informasi 		<p>dan Prasarana BLPBJ dan BLPBJ Purwakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Terlaksananya Pemeliharaan gedung BLPBJ Purwakarta 10. Terlaksananya Peningkatan kapasitas keahlian pengadaan barang/jasa
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB III

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa Penyusunan Cascading Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta bagi Pejabat Eselon yang ada dilingkup Sekretariat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah Laporan Cascading Kinerja ini dibuat semoga bermanfaat, kritikan dan saran yang disampaikan akan diterima untuk kesempurnaan dimasa mendatang.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**



Drs. H. IYUS PERMANA, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19620519 198903 1 011